

**PENGARUH PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MAROS**

***THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL INCOME REVIEWED FROM REGIONAL  
ORIGINAL INCOME IN THE GOVERNMENT MAROS DISTRICT***

Nursyam<sup>1</sup>, Mersi Sejan<sup>2</sup>

Akuntansi, Universitas Indonesia Timur

<sup>1</sup>adhenursyam07@gmail.com

<sup>2</sup>Mersisejan28@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Maros. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi tingkat keuangan daerah di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Lokasi penelitian adalah Kantor Bupati Maros yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Pettuadae, Turikale, Kabupaten Maros. Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis atau sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros, dan sampel adalah 30 dari jenis atau sumber Pendapatan Asli Daerah yang di pilih secara acak (Random). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Keuangan daerah di Kabupaten Maros.

**Kata Kunci:** Keuangan daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, pajak daerah

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether Regional Original Income can affect regional financial income in Maros Regency. This study aims to determine whether local revenue can affect the level of regional finance in Maros Regency. This study uses a type of qualitative data, the method of data collection is observation, interviews and documentation. Data sources are primary and secondary data. The research location is the Office of the Regent of Maros, which is located at Jalan Jenderal Sudirman No.1, Pettuadae, Turikale, Maros Regency. The population in this study are all types or sources of Regional Original Revenue in Maros Regency, and the sample is 30 of the types or sources of Regional Original Revenue that are selected randomly. The results of the analysis of this study indicate that Regional Original Revenue has an effect but not significantly on Regional Financial Revenues in Maros Regency.*

**Keywords:** Regional finance, local revenue, regional retribution, regional tax

**PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf (a) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah

tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan

merata.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (*Elita, 2007*).

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Menurut Mardiasmo (2014:15) dalam bukunya mendefinisikan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus secara nyata dan bertanggungjawab.

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dalam mengestimasi potensi Pendapatan Asli Daerah, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil yang terjadi dilapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah tersebut. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur sejauh mana kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah biasanya diukur dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah.

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu meningkatkan pelayanan, dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaian tinggi, maka fungsi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah akan tinggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: sumber pendapatan daerah, pengatur kegiatan ekonomi daerah, sarana stabilitas ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dititikberatkan hanya pada satu kasus saja dimana bertujuan mengetahui besarnya pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 1 (satu) variabel bebas yaitu: Pendapatan Asli Daerah (X) dan variabel terikat yaitu Pendapatan Keuangan Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros dari tahun 2013-2016. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30

yang dipilih secara acak dari beberapa jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan perusahaan daerah.

Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yaitu suatu alat analisis untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah terhadap Keuangan Daerah di Kabupaten Maros. Adapun persamaannya adalah:

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Keuangan Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pendapatan Asli Daerah

Nilai a, b dapat diperoleh dengan

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{n}$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kabupaten Maros adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kecamatan yang membawahi 103 desa/kelurahan, kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan kawasan metropolitan Mamminasata.

Dalam kedudukannya, kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros terletak dibagian Sulawesi Selatan antara

5°01'04 lintang selatan dan 119°34'35.0 bujur timur

### Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui sejauh mana

Kabupaten Maros dalam mengelolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di kabupaten maros, data tentang perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten maros secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pendapatan asli daerah menghasilkan Rp.889,535,865,877,33 meningkat menjadi Rp.996,257,593,449,95 pada tahun 2014, kemudian terus mengalami peningkatan menjadi Rp.1,122,337,127,197,85 di tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah mencapai Rp.1,225,060,147,567,70, tetapi belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Maros

Table 1. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013-2016

TAHUN	Target	Realisasi
2013	Rp.46,399,000,000.00	Rp.42,059,791,209,00
2014	Rp.59,199,000,000.00	Rp.57,503,299,764.00
2015	Rp.69,800,000,000.00	Rp.65,402,643,375.05
2016	Rp.78,551,000,000.00	Rp.68,652,715,363.95

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun terus meningkat yaitu pada tahun 2013 penerimaan mencapai Rp.42,059,791,209,00 dan selanjutnya pada tahun 2014 penerimaan meningkat sebesar Rp.57,503,299,764.00 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 65,402,643,375.05, dan realisasi penerimaan di tahun 2016 meningkat cukup pesat sebesar Rp.68,652,715,363.95 meskipun setiap tahun selalu mengalami peningkatan namun realisasi pajak daerah tersebut belum bisa mencapai target yang telah

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros.

Setelah melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan, namun sebagian besar target yang ingin di peroleh belum dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh: kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah, penundaan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pajak, Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya

hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Sehingga retribusi merupakan potensi ekonomi yang cukup memberikan peran terhadap penerimaan daerah.

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penggalan dan pemanfaatan potensi dari retribusi daerah ini senantiasa terus dimaksimalkan keberadaannya melalui berbagai upaya dan aktifitas serta kebijakan yang dapat memanfaatkan objek dan subjek retribusi yang ada.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah kabupaten maros dalam mengelola retribusi daerah tersebut dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan di kabupaten Maros, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2013 sampai tahun 2016.

Selama 4 tahun pengamatan, retribusi daerah terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 pertumbuhan retribusi daerah sebesar Rp.25,361,164,395,26 dan meningkat cukup tajam pada tahun 2014 sebesar Rp.39,364,471,771,99 selanjutnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 dengan jumlah Rp.49,569,289,628,88 dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan

jumlah 56,176,962,616,05. Meskipun selama periode pengamatan penerimaan retribusi daerah terus meningkat, namun realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah di tentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan penerimaan retribusi daerah belum optimal.

### Hasil Perusahaan Milik Daerah

Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah atau perda yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain.

Tujuan Badan usaha milik daerah adalah ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut, dan berusaha meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan.

Untuk hal ini maka pada tabel berikut akan diperlihatkan berapa besar realisasi hasil badan usaha milik daerah di Kabupaten Maros dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2. Realisasi Hasil Milik Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013-2016

TAHUN	Target	Realisasi
2013	Rp.4,500,000,000.00	Rp. 2,729,588,793,00
2014	Rp.5,000,000,000.00	Rp. 3,677,383,952,00
2015	Rp.6,500,000,000.00	Rp. 6,267,571,943,98
2016	Rp.10,314,224,400.00	Rp. 10,314,224,366,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros 2016

Berdasarkan table 2 maka dapat disimpulkan bahwa realisasi hasil perusahaan milik daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 hasil perusahaan milik daerah menghasilkan Rp.2,729,588,793,00

kemudian pada tahun 2013 menjadi Rp.3,677,383,952,00 dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp.6,267,571,943,98 pada tahun 2014 dan pendapatan paling tertinggi pada tahun 2016 dengan jumlah Rp.10,314,224,366,00, namun belum bisa



mencapai target yang ditetapkan. Nilai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Keuangan Daerah sebesar 0,376. Berarti termasuk dalam kategori korelasi cukup. Hasil output ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung ( $F_o$ ) = 4,610 dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0,041. Taraf signifikan sebesar  $0,05 >$  nilai signifikansi sebesar 0,041 berarti ada pengaruh. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 5,584. Nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,141 dengan nilai t-hitung ( $t_o$ ) sebesar 2,147 dan nilai signifikansi p-value 0,041. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa arah pengaruhnya positif, artinya semakin baik pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros maka perkembangan Keuangan Daerah juga akan semakin lebih baik.

Hasil output analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F- hitung ( $F_o$ ) sebesar 4,610 dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0,041.

- (a) Hasil output tabel coefficient menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi
- (b) sebesar 0,141 dengan nilai t-hitung ( $t_o$ ) sebesar 2,147 dan nilai signifikansi p-value sebesar 0,041.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai F-hitung ( $F_o$ ) sebesar  $4,610 >$  nilai F-tabel sebesar 4,20 sehingga menolak  $H_o$  dan menerima  $H_a$ . Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten Maros.

Berdasarkan kriteria hipotesis nilai t-hitung =  $2,147 >$  t-tabel = 2,048 sehingga menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel (X) dengan Keuangan Daerah sebagai variabel (Y). Berdasarkan hipotesis bahwa Pajak, Retribusi, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap Keuangan Daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_o$

ditolak dan  $H_a$  diterima pada taraf signifikan 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan. Tampak bahwa nilai koefisien korelasi sebesar  $r = 0,376$  mendekati 1 yang berada pada kategori korelasi kuat. Dan untuk koefisien determinasi tampak sebesar  $r^2 = 0,141$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Keuangan Daerah sebesar 14,1%, sedangkan 85,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil analisis uji-t dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung  $>$  t-tabel yaitu t-hitung =  $2,147 >$  t-tabel = 2,048 dengan tingkat signifikan 5% yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Keuangan Daerah meskipun pengaruh tersebut tidak cukup kuat yakni sebesar 14,1%. sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil pengujian ini tidak sesuai atau berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, yang pertama yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahidi (2013) Penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sangat erat terhadap Perkembangan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penelitian kedua yang dilakukan oleh Urip Putra mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua, menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,051% dan perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,709%. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad M (2014), yang menemukan bahwa semua variabel bebas secara

bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena semua sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Keuangan Daerah.

Oleh karena itu maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Maros diharapkan dapat mengembangkan dan mengelolah pajak daerah yang telah tersedia dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakat.
2. Retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang selalu menunjukkan peningkatannya setiap tahun, maka diharapkan pemerintah Kabupaten Maros dapat mengelola semua sumber retribusi daerah dengan baik, dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat akan kesadaran membayar retribusi dalam aktifitas sehari-hari.
3. Diharapkan pemerintah Kabupaten Maros lebih bijak dalam menetapkan kebijakan yang ada pada setiap perusahaan daerah, agar semua target pemerintah dapat tercapai dengan baik dan masyarakat Maros dapat merasakan perubahan dengan adanya perusahaan daerah.
4. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros diharapkan dapat dikelola dengan jujur dan bertanggungjawab, sehingga kedepannya Kabupaten Maros tidak lagi tergantung pada dana perimbangan dari pusat dan mampu mewujudkan derajat kemandirian daerah.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maros dan

segenap pihak civitas akademika Universitas Indonesia Timur yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Keuangan Kabupaten Maros

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

Elita, 2007. "**Proporsi Pendapatan Asli Daerah**" Rajawali.

Elita. 2007. "**Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal**".

Mardiasmo. 2014. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi, Jogjakarta.

Mardiasmo. 2014. "**Dalam bukunya mendefinisikan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan**".

Mardiasmo. 2011. **Perpajakan**. Jogjakarta. Andi Offset.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Warsito 2011. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu pendapatan asli daerah”.